



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan dengan terjadinya perubahan penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
 - (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan besaran hasil perhitungan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan realisasi pajak dan retribusi daerah.
 - (3) Besaran Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi Pagu BHPD dan BHRD 1 (Satu) tahun yang telah ditetapkan, apabila terdapat kurang salur maka akan diperhitungkan di tahun anggaran berikutnya.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 14 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 14 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

PERUBAHAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	494.255.276	12.809.486
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	594.462.036	16.761.846
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	313.947.725	6.468.958
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	350.805.321	13.641.763
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	441.980.984	17.290.633
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	386.260.782	13.064.706
7	BATUJAJAR	SELACAU	270.143.435	11.793.302
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	331.620.933	10.967.469
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	287.446.251	9.114.639
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	401.772.679	19.026.718
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	302.090.835	6.468.958
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	286.468.275	10.187.721
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	335.463.612	11.532.950
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	279.177.969	10.480.618
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	226.462.946	6.468.958
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	277.535.813	6.468.958
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	298.107.781	8.123.792
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	304.083.271	8.824.910
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	262.163.382	6.468.958
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	294.290.873	9.542.409
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	271.002.158	6.521.268
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	259.026.217	6.468.958
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	249.344.179	6.468.958
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	274.780.359	6.468.958
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	282.819.332	7.796.385
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	319.889.258	7.178.157
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	315.362.795	6.535.902
28	CIKALONGWETAN	RENDE	310.594.187	6.468.958
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	283.409.534	6.468.958
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	294.897.245	6.468.958
31	CILILIN	BATULAYANG	326.383.802	6.468.958
32	CILILIN	BONGAS	279.793.436	6.468.958
33	CILILIN	BUDIHARJA	215.664.881	6.468.958
34	CILILIN	CILILIN	316.001.304	40.960.564
35	CILILIN	KARANGANYAR	248.407.335	6.468.958

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	248.391.569	6.468.958
37	CILILIN	KARYAMUKTI	263.855.260	6.468.958
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	221.948.003	6.468.958
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	240.340.772	7.260.937
40	CILILIN	NANGGERANG	242.480.759	6.468.958
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	268.453.174	6.468.958
42	CIPATAT	CIPATAT	324.472.923	8.322.333
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	335.860.886	8.665.575
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	285.871.706	6.468.958
45	CIPATAT	CITATAH	383.803.259	8.596.555
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	387.094.948	9.555.950
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	238.818.779	6.468.958
48	CIPATAT	MANDALASARI	246.824.604	6.468.958
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	270.453.695	6.468.958
50	CIPATAT	NYALINDUNG	256.800.226	6.468.958
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	296.988.116	6.468.958
52	CIPATAT	SARIMUKTI	240.535.620	6.468.958
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	288.227.359	8.026.706
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	262.362.676	6.468.958
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	309.688.166	6.604.048
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	334.662.393	9.424.027
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	309.303.929	6.468.958
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	262.097.590	6.468.958
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	360.686.855	6.489.161
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	224.853.029	6.468.958
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	337.763.681	6.468.958
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	253.529.154	6.468.958
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	253.011.515	6.468.958
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	260.233.199	6.468.958
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	264.411.201	6.468.958
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	225.245.048	6.468.958
67	CIPONGKOR	CIBENDA	220.510.700	6.468.958
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	251.406.146	6.468.958
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	240.245.067	6.468.958
70	CIPONGKOR	CIJENUK	260.637.043	6.468.958
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	233.087.253	6.468.958
72	CIPONGKOR	CITALEM	252.886.804	7.833.298
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	219.266.021	6.468.958
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	220.878.970	6.468.958
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	230.370.102	6.468.958
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	234.963.064	6.468.958
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	245.604.786	6.468.958
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	236.322.448	6.468.958
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	230.955.351	6.468.958
80	CISARUA	CIPADA	256.438.829	6.468.958
81	CISARUA	JAMBUDIPA	464.290.813	15.884.466
82	CISARUA	KERTAWANGI	442.143.895	7.853.610

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)
83	CISARUA	PADAASIH	438.358.519	13.358.695
84	CISARUA	PASIRHALANG	310.566.294	6.468.958
85	CISARUA	PASIRLANGU	292.509.151	6.468.958
86	CISARUA	SADANGMEKAR	307.193.856	6.468.958
87	CISARUA	TUGUMUKTI	264.978.765	6.502.703
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	238.779.365	7.017.730
89	GUNUNGHALU	CELAK	229.570.601	6.468.958
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	268.973.744	6.806.630
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	271.790.543	7.406.075
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	257.053.487	6.468.958
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	233.427.225	6.468.958
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	235.201.267	6.468.958
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	244.460.765	6.468.958
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	225.054.850	6.468.958
97	LEMBANG	CIBODAS	329.221.419	6.468.958
98	LEMBANG	CIBOGO	416.895.791	14.372.586
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	371.330.092	9.963.953
100	LEMBANG	CIKIDANG	337.531.844	6.468.958
101	LEMBANG	CIKOLE	460.606.902	9.672.694
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	493.598.171	9.034.917
103	LEMBANG	JAYAGIRI	521.460.141	23.052.794
104	LEMBANG	KAYUAMBON	368.327.441	11.746.998
105	LEMBANG	LANGENSARI	393.839.013	6.479.005
106	LEMBANG	LEMBANG	629.031.589	88.416.841
107	LEMBANG	MEKARWANGI	365.874.566	6.468.958
108	LEMBANG	PAGERWANGI	441.167.839	7.499.011
109	LEMBANG	SUKAJAYA	430.078.211	6.708.124
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	277.023.732	6.472.343
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	313.032.003	7.971.992
112	LEMBANG	WANGUNSARI	357.089.049	6.468.958
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	361.979.841	8.096.381
114	NGAMPRAH	CILAME	1.376.414.500	32.945.325
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	387.580.752	6.468.958
116	NGAMPRAH	CIMAREME	660.451.243	32.008.535
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	521.005.463	71.630.849
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	323.351.135	12.582.114
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	348.542.240	9.262.398
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	397.142.728	8.688.399
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	365.796.142	8.360.228
122	NGAMPRAH	SUKATANI	270.346.468	8.945.694
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	1.326.457.861	31.332.317
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	410.462.491	6.468.958
125	PADALARANG	CIBURUY	403.704.681	9.610.992
126	PADALARANG	CIMERANG	566.274.343	8.792.256
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	819.597.432	13.514.099
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	559.707.439	11.247.370
129	PADALARANG	KERTAJAYA	709.670.028	71.746.293

NO	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)
130	PADALARANG	KERTAMULYA	686.038.915	24.767.365
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	629.426.236	17.107.381
132	PADALARANG	PADALARANG	760.312.170	69.031.045
133	PADALARANG	TAGOGAPU	433.055.597	7.969.044
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	606.790.684	14.397.267
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	667.157.613	8.950.499
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	425.676.255	15.919.959
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	738.689.158	36.271.484
138	PARONGPONG	CIWARUGA	635.111.678	30.609.904
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	476.233.808	9.302.150
140	PARONGPONG	SARIWANGI	707.438.782	18.040.239
141	RONGGA	BOJONG	270.327.368	6.468.958
142	RONGGA	BOJONGSALAM	214.469.520	6.468.958
143	RONGGA	CIBEDUG	234.915.868	6.468.958
144	RONGGA	CIBITUNG	259.009.541	6.468.958
145	RONGGA	CICADAS	220.555.066	8.436.019
146	RONGGA	CINENGAH	286.303.948	6.468.958
147	RONGGA	SUKAMANAH	254.125.824	6.468.958
148	RONGGA	SUKARESMI	250.544.795	6.468.958
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	307.175.867	6.468.958
150	SAGULING	CIKANDE	269.648.434	6.549.335
151	SAGULING	CIPANGERAN	225.046.967	6.468.958
152	SAGULING	GIRIMUKTI	247.301.717	6.468.958
153	SAGULING	JATI	228.843.359	6.468.958
154	SAGULING	SAGULING	252.148.143	6.468.958
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	259.206.208	6.468.958
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	236.772.275	6.468.958
157	SINDANGKERTA	CIKADU	279.006.164	6.468.958
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	245.673.407	9.929.225
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	231.995.481	6.468.958
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	252.670.330	6.468.958
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	226.292.959	6.468.958
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	264.673.558	6.468.958
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	245.418.630	7.421.255
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	260.839.773	6.468.958
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	253.599.291	6.471.579
Total			57.100.000.000	1.778.953.390

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ADE ZAKIR